



ISSN 1979-3774

# ISLAMADINA

Jurnal Ilmiah Berbasis Ilmu-ilmu Keislaman

Vol. VII No. 1, Maret 2011

## ISLAM

&

## TERORISME

Diterbitkan Oleh:  
Institute for Religious and Institutional Studies  
(IRIS) Bandung

## DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>RADIKALISME DALAM SEJARAH UMAT</b> <i>Oleh: Dr. H. Undang Ahmad Kamaludin, M.Ag</i> .....	1
<b>JIHAD DAN KELUASAN PENGERTIANNYA</b> <i>Oleh: Dr. Badri Khaeruman, M.Ag</i> .....	17
<b>ISLAM, RADIKALIME, DAN DEMOKRASI</b> <i>Oleh: Riza Sihbudi</i> .....	19
<b>JIHAD DAN TERORISME</b> <i>Oleh: Prof. Dr. H. Azyumardi Azra</i> .....	29
<b>TAUHID: SUMBER RADIKALIME ISLAM</b> <b>Studi atas Pemikiran Ali Shariati tentang Pertentangan Sosial</b> <i>Oleh: M. Taufik Rahman</i> .....	45
<b>KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI TERORISME</b> <b>DI INDONESIA</b> <i>Oleh: Dr. H. Uce K. Suganda</i> .....	55
<b>AKAR-AKAR ISLAMISME RADIKAL DI INDONESIA</b> <i>Oleh: Muhammad Wildan</i> .....	67
<b>PERANAN INSITUSI AGAMA (ISLAM) DALAM PELAKSANAAN NEGARA:</b> <b>Studi Pengalaman Indonesia dan Pakistan</b> <i>Oleh: Wahyudin Darmalaksana, M.Ag</i> .....	79

\*\*\*

## PERANAN INSTITUSI AGAMA (ISLAM) DALAM PELAKSANAAN NEGARA: Studi Pengalaman Indonesia dan Pakistan

Oleh: Wahyudin Darmalaksana, M.Ag  
Dosen Fak. Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

### *Abstrak:*

*Peranan institusi agama menghendaki terbentuknya otonomi institusional dalam berbagai aspek, seperti politik, hukum, ekonomi, sains, pendidikan, kesehatan, dan agama. Otonomi institusi agama berperan menghubungkan dirinya dengan sistem-sistem sosial lainnya dalam masyarakat. Yakni untuk diterapkan ke dalam masalah-masalah yang muncul pada sistem institusional lainnya, tetapi tidak terpecahkan oleh sistem itu, seperti kemiskinan ekonomi, korupsi, tekanan politik, dan lain-lain.*

*Dalam realitasnya, formasi sosial Muslim yang menyatukan agama dan negara, cenderung untuk berkembang pada waktunya menjadi semacam formasi sosial Muslim yang memisahkan agama dan negara. Oleh karena itu, sebuah negara Islam di sini bisa menjadi sebuah jalan untuk perkembangan sosial politik masyarakat Muslim di mana agama dan negara berdampingan bersama dalam sebuah hubungan otonomi tetapi saling menguntungkan.*

**Keywords:** Kepercayaan, Negara Islam, Negara Sekuler, Peranan.

### **Pendahuluan**

Orang dapat saja mengasumsikan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi agama akan lebih kuat dalam tatanan sosial yang mengintegrasikan antara agama dan negara dibanding dalam tatanan yang memisahkannya. Tetapi justru sebaliknya, dalam kenyataannya institusi agama dipercaya lebih rendah dalam tatanan sosial yang mengintegrasikan agama dan negara dibanding dalam tatanan yang memisahkannya.<sup>1</sup> Tentu hal ini, tidak diduga sebelumnya, tetapi hal ini merupakan kenyataan yang sulit dibantah.

Dalam sejarah dunia Islam telah dikenal ada dua jenis institusional Islam: *pertama*, konfigurasi institusional yang memisahkan agama dan negara dalam ruang yang berbeda, yang lazim disebut “Negara Sekuler”, dan *kedua*, konfigurasi institusional yang mengintegrasikan agama dan negara, yang populer disebut “Negara Islam”. Mayoritas

masyarakat Muslim dunia berada dalam formasi sosial yang disebutkan pertama. Sedangkan negara yang mengklaim dirinya sebagai negara Islam di antaranya Arab Saudi, Republik Islam Iran, Republik Islam Pakistan, Sudan dan Afganistan.

Riaz Hassan, setelah melakukan penelitian di beberapa negara Muslim, ia sampai pada kesimpulan bahwa tingkat kepercayaan yang rendah terhadap institusi agama dalam masyarakat secara negatif mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap institusi negara. Sebelumnya, Hassan mengetengahkan hipotesis bahwa hubungan antara tingkat kepercayaan terhadap lembaga agama dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara akan lebih kuat pada formasi sosial Muslim yang tidak terpisahkan antara agama dan negara dibandingkan pada formasi sosial Muslim yang dipisahkan. Justru Hassan menemukan kenyataan yang sebaliknya, ia menuturkan sebuah negara Islam yang mengalami krisis kepercayaan yang berakibat pada melemahnya legitimasi politik, pada kenyataannya dapat menyebabkan erosi kepercayaan terhadap institusi Islam.<sup>2</sup>

Dari paparan di atas, yang menjadi inti masalahnya adalah, bagaimanakah peranan institusi agama, khususnya untuk memperoleh pengaruh publik yang kuat, yang pada gilirannya ia akan memperoleh legitimasi sosial politik di dalam penyelenggaraan negara?

### **Perbedaan Bentuk Negara: Indonesia dan Pakistan**

Untuk menunjuk negara yang menegaskan dirinya sebagai negara Islam dapat dilihat dalam potret negara Pakistan. Sedangkan untuk negara yang dipandang menganut sistem sekuler dapat dilihat dalam negara Indonesia. Penunjukan Pakistan dan Indonesia hanyalah masalah teknis saja dalam mewakili perbedaan dua jenis negara Muslim antara Negara Islam dan Negara Sekuler.

Indonesia adalah negara Muslim paling besar, dengan perkiraan penduduk pada 1998 sekitar 200 juta, 88 persen adalah kaum Muslim. Seperti halnya hampir semua negara Muslim, Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dengan *Gross National Product* (GNP) perkapita pada tahun 1997 yakni 1110 dolar AS. Hingga saat ini, dikalangan negara-negara berkembang, Indonesia adalah salah satu negara paling cepat berkembang secara ekonomis. Tidak seperti negara-negara Muslim lainnya, Indonesia sangat berhasil dalam menyediakan pendidikan umum bagi warga negaranya. Keberhasilan kebijakan pendidikan pemerintah Indonesia dalam tiga dasawarsa terakhir telah berhasil mengubah profil pendidikan negara ini. Juga Indonesia dapat melakukan pemulihan setelah dilanda krisis ekonomi.

Hampir semua orang Indonesia adalah Muslim Sunni dan pengikut mazhab Syafi'i. Islam disebarkan oleh para pedagang Asia Selatan dan Arab serta kaum sufi pada abad ke-13. Pertumbuhan yang cepat terjadi pada abad ke-15 dan ke-16, dan pada abad ke-18

mayoritas penduduk Jawa dan Sumatera sudah memeluk Islam. Karena pengaruh sufisme, mistisisme merupakan bagian penting bagi Indonesia, orientasi keagamaan ini telah memungkinkan Islam Indonesia mengambil simbol dan metafora budaya lokal. Akibatnya, Islam Indonesia menjadi kenyal, sinkretik, warna-warni, dan berlapis-lapis. Ungkapannya bercampur baur secara akrab dengan struktur budaya Jawa. Kelas penguasa dan petani menyerap konsep dan praktik Islam ke dalam panteisme India dan animisme. Kelas pedagang, yang menjadi kelas menengah, lebih banyak mengambil Islam Timur Tengah dan Asia Selatan sebagai akibat dari aktivitas dagang mereka, dan akibatnya Islam mereka bersifat doktriner dan puritan.

Sebagai akibat dari pengaruh tersebut, Islam Indonesia kontemporer memiliki dua tradisi yang kokoh. Keduanya diwakili oleh dua organisasi massa. Islam Sufi, atau Islam populer, yang mendominasi daerah-daerah pedesaan dan pesantren, diwakili oleh Nahdlatul Ulama, dan Islam skriptualis modernis yang mendominasi wilayah-wilayah perkotaan, diwakili oleh Muhammadiyah. Para ahli Islam, yang dalam budaya lokal disebut kiyai, menjadi simbol Islam Sufi atau Islam populer, sementara para intelektual Muslim mendominasi kegiatan-kegiatan Muhammadiyah.

Kerangka kelembagaan Indonesia sekular didasarkan pada pemisahan yang tegas antara agama dan negara. Dalam hal ini pemerintah Indonesia meneruskan kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Ideologi negara dikenal sebagai Pancasila dan diberlakukan secara ketat. Sejak berdiri pada tahun 1945, negara Indonesia diperintah oleh pemerintahan otoriter yang didominasi tentara. Akibatnya, perkembangan *civil society* telah terganggu, banyak lembaga masyarakat didominasi oleh aparat pemerintah.<sup>3</sup> Walaupun ideologi negara memperoleh banyak tantangan, yang kadang cukup militan, pemerintah Indonesia secara umum berhasil menerapkan Pancasila secara ketat.<sup>4</sup> Hasilnya adalah masyarakat Indonesia sekular dan masyarakat kapitalis modern.

Sementara itu, Pakistan, dengan penduduk sekitar 142 juta pada 1998, adalah negara Muslim terbesar kedua di dunia. Pakistan berdiri pada 1947, setelah anak benua India tersebut merdeka dari Inggris yang kemudian terbelah menjadi India dan Pakistan. Ia didirikan sebagai tanah air yang terpisah bagi kaum Muslim di India, terdiri dari wilayah-wilayah yang mayoritas Muslim di wilayah-wilayah bagian Utara dan Selatan anak benua ini. Pada Tahun 1972, bagian timur negara ini, memisahkan diri dan membentuk Bangladesh. Pakistan sekarang terdiri dari provinsi-provinsi Punjab, Sindh, Baluchistan dan Perbatasan Barat Laut.<sup>5</sup>

Pakistan adalah negara berkembang dengan GNP perkapita 490 dolar AS pada 1997. Ia merupakan salah satu negara paling miskin di dunia. Berbeda dengan Indonesia, Pakistan memiliki catatan pembangunan yang lambat dan tingkat buta huruf yang tinggi. Usaha pemerintah untuk menyediakan pendidikan bagi masyarakat tidak begitu berhasil karena berbagai rintangan, baik bersifat sosial, kultural, maupun ekonomi. Lebih dari 95

persen penduduk Pakistan beragama Islam. Sekitar 85 persen orang Pakistan merupakan Muslim Sunni dan mengikuti mazhab Hanafi. Sementara itu sekitar 15 persen Muslim Pakistan penganut Syi'ah. Sejak merdeka Pakistan berkembang menjadi sebuah negara Islam.

Pakistan bukanlah negara teokratik, undang-undangnya menjelaskan bahwa Pakistan akan menjadi negara demokratis berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pasal 198 dalam undang-undang menjelaskan bahwa semua hukum harus sesuai dengan ajaran Islam seperti terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Sejak 1971, Islamisasi diterapkan menjadi kebijakan negara. Yang paradoks adalah bahwa adopsi kebijakan Islamisasi terbukti menimbulkan perpecahan baik secara sosial maupun politik. Dalam sejarah Pakistan dikendalikan oleh pemerintah yang otoriter, birokratik dan oligarki militer. Namun dengan urbanisasi dan industrialisasi, tekanan untuk demokratisasi proses politik telah mendapatkan momentum.<sup>6</sup>

Pada tingkat sosio-kultural, Islam memegang peranan penting dalam kehidupan orang-orang Pakistan. Namun, seperti halnya banyak di negara Muslim, sektarianisme agama menjadi fakta kehidupan di Pakistan dan menjadi sumber instabilitas sosial, politik, dan kekerasan lainnya. Terdapat banyak variasi dalam cara orang mengartikulasikan, menafsirkan, dan mempraktekkan keyakinan mereka dan mengatasi implikasinya dalam kehidupan individual dan kolektif. Untuk tujuan analitis, orang bisa menjelaskan situasi keagamaan dan intelektual Islam di Pakistan dengan menggunakan paling tidak empat kategori yang berbeda, yaitu legalistik, sufisme (Islam populer), reformis (liberal), dan revivalis (fundamentalis Islam). Partai keagamaan Jamaat-i-Islami beserta Jamiat-e-Ulema Pakistan dan Jamiat-i-Ulema-i-Islam memegang peranan penting dalam Islam revivalis (fundamentalis).<sup>7</sup> Dalam tahun-tahun terakhir kelompok fundamentalis sempalan muncul namun sulit menentukan pengaruhnya.<sup>8</sup>

### **Kepercayaan Terhadap Institusi Agama dan Negara: Kasus Indonesia dan Pakistan**

Dari sebuah penelitian di Indonesia dan Pakistan, relatif hampir seluruh responden mempercayai angkatan bersenjata, pers, televisi, universitas, dan para intelektual. Namun, institusi-institusi agama seperti ulama, imam masjid, dan kiyai mendapatkan kepercayaan lebih besar dibandingkan institusi negara. Institusi utama negara, yaitu parlemen, pengadilan, layanan sipil, dan partai politik mendapat tingkat kepercayaan yang menengah sampai rendah untuk kebanyakan orang. Angkatan bersenjata dipercayai cukup besar oleh mayoritas masyarakat, dan khususnya di Pakistan ia adalah institusi yang paling dipercaya di masyarakat. Namun demikian, perbedaan yang paling mencolok terkait dengan kepercayaan terhadap institusi-institusi Islam. Di Indonesia, ulama dan imam masjid adalah institusi yang paling dipercaya dalam masyarakat sipil. Juga institusi kiyai sangat dipercaya di

Indonesia, tetapi begitu kurang di Pakistan. Di Pakistan situasinya sangat berbeda, tiga lembaga tersebut dipercaya oleh kurang dari setengah jumlah responden secara keseluruhan.

Tiga institusi lain yang dipercaya oleh mayoritas responden secara signifikan di Indonesia dan Pakistan adalah para intelektual, universitas dan sekolah. Tingkat kepercayaan terhadap institusi ini khususnya di Indonesia tergolong tinggi. Media massa dihargai cukup tinggi di Indonesia dan tidak begitu di Pakistan. Lihat tabel berikut di bawah ini:

Tabel:  
Kepercayaan terhadap institusi-institusi kunci (%)<sup>9</sup>

<b>Institusi</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Pakistan</b>
Ulama	96	48
Imam Masjid	94	44
Pirs/Kiyai	91	21
Parlemen	53	22
Pengadilan	55	55
Pelayanan Sipil	58	26
Partai Politik	35	12
Angkatan Bersenjata	68	82
Media Cetak	84	38
TV	80	31
Perusahaan Besar	42	29
Universitas	88	60
Sekolah	92	71
Intelektual	92	66

Orang akan mengira bahwa karena Pakistan adalah negara yang memiliki formasi sosial yang tidak memisahkan agama dan negara, tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga keagamaan seharusnya relatif cukup tinggi. Ternyata hasilnya sangat berlawanan. Juga orang tidak akan menduga bahwa lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia dihargai cukup tinggi. Kepercayaan pada institusi agama dalam masyarakat Indonesia kontemporer terlihat dengan jelas sekali. Institusi-institusi negara ini mendapatkan kepercayaan yang rendah sampai menengah, dan institusi-institusi agama mendapat penghargaan yang paling tinggi. Di Pakistan, baik institusi negara maupun institusi agama mendapatkan kepercayaan yang rendah.<sup>10</sup>

Dengan demikian, tingkat kepercayaan terhadap institusi agama secara langsung berhubungan dengan tingkat kepercayaan terhadap institusi negara. Dalam sebuah negara Islam, kepercayaan yang rendah terhadap negara sekaligus menimbulkan kepercayaan yang rendah pula terhadap institusi agama. Tetapi dalam sebuah negara sekular, kepercayaan

yang rendah terhadap institusi negara belum tentu menimbulkan kepercayaan yang rendah terhadap institusi agama. Justru sebaliknya institusi agama akan memperoleh pengaruhnya yang kuat berpulang pada efektifitas peranannya dalam masyarakat.

### **Menyoal Peranan Institusi Agama dalam Negara**

Peranan institusi keagamaan akan memperoleh pengaruh publik bila institusi tersebut melaksanakan kinerjanya secara efisien. Menurut Luhmann, ketika membicarakan peranan agama dalam masyarakat modern ia menunjukkan ciri khusus dari masyarakat modern, yakni perbedaan dan spesialisasi fungsional. Hal ini menghendaki instrumental fungsional yang otonom seperti politik, hukum, ekonomi, sains, pendidikan, kesehatan, dan agama. Dalam konteks ini, tingkat pengaruh publik yang didapatkan oleh agama bergantung pada bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan sistem-sistem sosial lainnya dalam masyarakat. Luhmann menggunakan istilah “fungsi” dan “performa” untuk menganalisis hubungan ini.<sup>11</sup>

Fungsi merujuk kepada komunikasi agama murni yang secara beragam disebut kebaktian dan ibadah, pemeliharaan jiwa, pencarian keselamatan dan pencerahan. Fungsi adalah komunikasi sosial murni yang melibatkan hal yang transenden dan aspek yang diklaim oleh institusi agama atas dasar otonomi mereka dalam masyarakat modern. Kinerja agama, sebaliknya, ketika agama diterapkan kepada masalah-masalah yang muncul pada sistem institusional lainnya, tetapi tidak terpecahkan oleh sistem itu atau tidak disinggung di mana pun, seperti kemiskinan ekonomi, korupsi, tekanan politik, dan lain-lain. Institusi agama memperoleh pengaruh publik melalui peranan performa dengan memecahkan masalah-masalah non-religius atau profan. Masalah fungsional agama dalam masyarakat modern adalah masalah performa itu.<sup>12</sup>

Teori Luhmann mengharuskan otonomi institusi agama berhadapan dengan institusi negara dan sub-sistem institusional lainnya, yang oleh Luhmann disebut “sekularisasi”. Suatu deduksi logis mengenai hal ini adalah bahwa institusi agama akan memperoleh pengaruh publik yang lebih besar dalam konfigurasi kelembagaan di mana mereka semua bersifat otonom dari negara. Jika tidak demikian, maka mereka tidak akan dapat melaksanakan peranan kinerja mereka secara efektif.

Kenyataannya, banyak negara Islam yang merupakan produk dari proses dekolonisasi, di mana gerakan-gerakan nasionalis dipegang oleh pemimpin yang relatif sekular. Negara-negara baru ini telah menentukan identitas mereka dengan istilah-istilah nasionalis, dan dalam banyak kasus telah memelihara institusi-institusi hukum, pendidikan dan politik yang sekular yang diwariskan dari masa kolonial. Meskipun demikian, gerakan pembaharuan Islam bermunculan di banyak negara Islam, dan pada umumnya negara-negara tersebut mencela dengan terang-terangan kecenderungan sekularisasi, dan



menyerukan untuk kembali kepada negara yang menunjukkan identitas keislaman dan mendorong kepada jalan hidup yang Islami. Jalan hidup Islam yang dibayangkan adalah didasarkan kepada hukum syari'ah dan pemberlakuan institusi agama dalam kehidupan sosial.

Pandangan yang umumnya dijelaskan oleh para sarjana Islam adalah bahwa Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai *blueprint* dari tatanan sosial yang ada dan karena itu Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum dan negara.<sup>13</sup> Akan tetapi, meskipun ada pernyataan umum (dan cita-cita ideal umat Islam) bahwa institusi-institusi negara dan agama menyatu, dan bahwa Islam adalah jalan hidup total yang menentukan masalah-masalah politik, sosial dan keluarga, kebanyakan masyarakat Islam tidak sejalan dengan cita-cita ini, sehingga justru terbangun institusi negara dan agama yang terpisah. Realitanya, mayoritas masyarakat Muslim mengikuti formasi sosial yang terdiferensiasi antara agama dan negara.<sup>14</sup>

Tugas utama negara pada dasarnya adalah memerintah dan mengatur urusan masyarakat dengan cara yang adil dan tidak memihak. Ketika negara atau institusi utamanya kurang memiliki legitimasi sosial/politik dalam pikiran rakyat, negara terkadang menggunakan berbagai macam paksaan untuk menjamin kepatuhan dan ketundukan masyarakat. Dalam prosesnya mungkin rakyat tidak dapat menghindar untuk menentang otoritarianisme negara, yang pada gilirannya menimbulkan respon negara yang jauh lebih otoriter. Hal ini mengakibatkan perlawanan yang lebih jauh, dengan demikian maka berkembanglah sebuah siklus respon otoriter dan perlawanan. Negara pada akhirnya dipandang otoriter, opresif, dan tidak adil, dan berakibat pada mobilisasi politik untuk melawan negara. Institusi masyarakat sipil yang bertindak sebagai mobilisator dari perlawanan ini kemudian memperoleh kepercayaan publik dan pada akhirnya mendapatkan penghargaan dan legitimasi yang tinggi di kalangan masyarakat umum.

Di Indonesia dapat terlihat tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap institusi agama dan juga institusi masyarakat sipil lainnya, seperti sekolah, universitas, dan para intelektual di kalangan rakyat. Karena masyarakat ini adalah contoh dari formasi sosial Muslim yang memisahkan antara agama dan negara, maka institusi agama memainkan suatu peranan publik dalam mobilisasi perlawanan terhadap negara, dengan demikian meningkatkan penghargaan mereka dalam pikiran orang banyak. Universitas, sekolah, dan para intelektual di kalangan rakyat juga mendapatkan penghargaan yang tinggi karena alasan yang sama. Namun di Pakistan situasinya berbeda. Pakistan merupakan contoh dari sebuah formasi sosial yang tidak memisahkan agama dan negara, dan oleh karenanya erosi kepercayaan terhadap institusi negara juga memperkecil kepercayaan terhadap institusi keagamaan yang dianggap sebagai bagian dari negara. Tingkat yang rendah terhadap institusi keagamaan di Pakistan lebih jauh mengurangi kepercayaan terhadap institusi negara.

Kurangnya legitimasi negara dapat menyebabkan atau memperbesar perasaan tidak aman di kalangan masyarakat. Mungkin perasaan tidak aman ini menyebabkan persepsi yang positif terhadap angkatan bersenjata sebagai kekuatan pengganti untuk perasaan yang tidak aman. Di Pakistan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi mungkin juga disebabkan oleh persepsi dalam pikiran rakyat awam terhadap ancaman politik dan militer dari India, yang karenanya pemerintahan Pakistan mengeluarkan kebijakan umum untuk membuat alokasi dana yang besar untuk angkatan bersenjatanya. Kudeta militer terhadap pemerintahan Perdana Menteri Nawaz Sharif yang terpilih secara demokratis tidak menimbulkan gejolak umum dari rakyat. Sebaliknya, hal itu sebagian besar disambut baik oleh rakyat Pakistan. Sikap publik ini sesuai dengan temuan bahwa institusi yang paling dipercaya di Pakistan adalah angkatan bersenjata.

Jelaslah bahwa di mata para elit agama di negara-negara Muslim, ternyata sebuah negara Islam tidak selalu mendapat perhatian yang terbaik dari institusi agama dan elit agamanya. Sebab, ketika negara mengalami krisis kepercayaan rakyat, maka kepercayaan mereka terhadap institusi agama pun akan dapat berkurang juga. Hal ini bisa mempunyai implikasi sosial, budaya, politik, dan agama yang serius. Yang terpenting kemudian adalah institusi agama dalam sebuah masyarakat Muslim harus terus memainkan peranan sosial, budaya dan agama yang konstruktif ketika agama tetap dipisah dari negara dan ketika institusi ini mendapatkan tempat yang layak dalam konfigurasi institusional di masyarakat.

## **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Dunia Islam mengenal dua jenis institusional negara, yakni Negara Sekuler dan Negara Islam. Jika contoh negara Islam dapat diwakili oleh Pakistan, maka contoh negara sekuler dapat diwakili oleh Indonesia.
2. Di Indonesia, negara sekuler, tingkat kepercayaan terhadap institusi-institusi agama cukup tinggi dibandingkan terhadap institusi-institusi negara. Sedangkan di Pakistan, negara Islam, baik kepercayaan terhadap institusi agama maupun institusi negara cukup rendah. Rakyat Pakistan lebih percaya terhadap angkatan bersenjata.
3. Ternyata, dalam negara Islam, kepercayaan yang rendah terhadap institusi berimplikasi terhadap kepercayaan yang rendah pula terhadap institusi agama. Sebab, antara agama dan negara menajadi bangunan yang menyatu. Sedangkan dalam negara sekuler, kepercayaan yang rendah terhadap institusi negara tidak secara langsung berimplikasi terhadap rendahnya kepercayaan terhadap institusi agama. Sebab, antara agama dan negara menajadi bangunan yang terpisah. Justru bila institusi agama dapat menjalankan peranannya dengan efisien akan memperoleh pengaruh yang lebih kuat.

4. Peranan institusi agama menghendaki terbentuknya otonomi institusional dalam berbagai aspek, seperti politik, hukum, ekonomi, sains, pendidikan, kesehatan, dan agama. Otonomi institusi agama berperan menghubungkan dirinya dengan sistem-sistem sosial lainnya dalam masyarakat. Yakni untuk diterapkan ke dalam masalah-masalah yang muncul pada sistem institusional lainnya, tetapi tidak terpecahkan oleh sistem itu, seperti kemiskinan ekonomi, korupsi, tekanan politik, dan lain-lain.

Dari kesimpulan di atas terdapat beberapa rekomendasi:

1. Bagi elit agama di negara-negara Muslim tidak perlu terpaku ke dalam pemikiran untuk menyatukan agama dan negara. Sebab, krisis kepercayaan terhadap institusi agama akan menyebabkan kepercayaan yang rendah pula terhadap institusi agama, dan pada gilirannya dapat mengganggu situasi tidak kondusif terhadap universalitas Islam.
2. Bagi elit pemerintah akan bijaksana bila menerapkan politik kompromi dan akomodatif terhadap institusi Islam. Sebab, karena tingkat kepercayaan terhadap institusi agama berhubungan langsung dengan tingkat kepercayaan terhadap institusi negara, maka upaya untuk membuat Islam tidak stabil dapat memiliki konsekuensi yang buruk bagi tingkat kepercayaan dan juga legitimasi negara.
3. Bagi elit agama dan pemerintah, yang telah 'terlanjur' menyatukan agama dan negara, harus dapat membuka jalan bagi untuk perkembangan sosial politik masyarakat Muslim, sekalipun pada gilirannya harus merelakan konsekuensi di mana agama dan negara kemudian menjadi berdampingan bersama secara ideal dalam sebuah hubungan otonomi tetapi saling menguntungkan.

### Daftar Pustaka

- Bachtiar Efendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, Jakarta: Logos, 1999.
- Davi Taylor, "Politik Islam dan Islamisasi Pakistan" dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.
- Fachri Ali, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan; keharusan Demokratisasi dalam Islam di Indonesia* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Leo Suryadinata, *Elections and Politics in Indonesia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002.

Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.

Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Cet. III; Bandung: Mizan, 1996.

Riaz Hassan, "Faitlines: Muslim Conception of Islam and Society", Terj. Jajang Jahroni, dkk., *Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Yusrill Ihaza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam; Perbandingan Partai Masyumi dan Partai Jama'at-Islami*, Jakarta; Paramadina, 1998.

### Catatan Kaki:

<sup>1</sup> Riaz Hassan telah membuktikan hal ini ketika ia melakukan penelitian sosiologis di beberapa negara, seperti Mesir, Indonesia, Pakistan dan Kazakhstan. Lihat Riaz Hassan, "Faitlines: Muslim Conception of Islam and Society" (Terj. Jajang Jahroni, dkk.), *Keragaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 164-169.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 175-176.

<sup>3</sup> Lihat Fachri Ali, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan; keharusan Demokratisasi dalam Islam di Indonesia* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 213.

<sup>4</sup> Lihat Bachtiar Efendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 81. Lihat juga Leo Suryadinata, *Elections and Politics in Indonesia*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002), hlm. 10-11.

<sup>5</sup> Lihat Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan* (Cet. III; Bandung: Mizan, 1996), hlm. 9.

<sup>6</sup> Lihat Davi Taylor, "Politik Islam dan Islamisasi Pakistan" dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989), hlm. 137.

<sup>7</sup> Lihat Yusrill Ihaza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam; Perbandingan Partai Masyumi dan Partai Jama'at-Islami*, (Jakarta; Paramadina, 1998), hlm. 205.

<sup>8</sup> Riaz Hassan, *Op. Cit.*, hlm. 27-28.

<sup>9</sup> Riaz Hassan pada saat melakukan survei ini melibatkan 1472 responden di Indonesia dan 1162 responden di Pakistan. *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>10</sup> Dalam sebuah penelitian serupa di Pakistan tahun 1996, sebuah sampel dari 821 responden kota yang dipilih secara acak ditanya mengenai seberapa besar mereka mempercayai institusi-institusi berikut ini: militer, sarjana agama, industri, pengadilan, koran, parlemen, politisi, pegawai pemerintahan, dan polisi. Hasilnya adalah: militer 78 persen, sarjana agama 44 persen, industri 38 persen, pengadilan 34 persen, koran 29 persen, parlemen 21 persen, politisi 19 persen, pegawai pemerintahan 17 persen, dan polisi 10 persen.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 174.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

<sup>13</sup> Lihat Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 220-224.

<sup>14</sup> Indonesia, misalnya, dengan ideologi Pancasila. Ideologi ini diadopsi pada 1945 ketika Indonesia merdeka dari Belanda. Pada masa itu, pendiri sekaligus presiden RI, Soekarno, menentang tuntutan-tuntutan dari para pemimpin Islam yang menginginkan sebuah negara yang berdasarkan Islam, dan membujuk mereka untuk menerima rumusan sekularnya yang lebih luas. Lihat Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 156.

\*\*\*